

LAPORAN KINERJA 2025



SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Setditjen PDSPKP) Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kepada para pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini memuat capaian kinerja, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah direalisasikan oleh Setditjen PDSPKP dalam menjalankan fungsi pelayanan teknis dan administratif. Melalui laporan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian peningkatan kinerja Setditjen PDSPKP.

Pada Triwulan III Tahun 2025, kinerja Setditjen PDSPKP ditunjukkan melalui pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,9% yang termasuk dalam kategori “Baik”. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Tim Kerja Lingkup Setditjen PDSPKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban yang informatif kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan mandat serta capaian kinerja yang telah ditetapkan serta menjadi landasan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Seluruh capaian ini dibangun atas dasar internalisasi nilai-nilai organisasi #KITAPDS, yakni Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Jakarta, 20 Oktober 2025
Sekretaris Ditjen PDSPKP

Machmud

IKHTISAR EKSKLUSIF

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 Sekretariat Ditjen PDSPKP memiliki 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan. 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan bersifat triwulanan, 2 (dua) bersifat semesteran, dan 15 (lima belas) bersifat tahunan.

Sebanyak 20 indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2025. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 108,9% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat tiga (3) indikator kinerja yang bersifat triwulanan dan seluruhnya telah diukur hingga Triwulan III. Ketiga indikator tersebut menunjukkan capaian optimal, yakni: (1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP, (2) Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen PDSPKP, (3) Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
2. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu: (1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP, (2) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP:
3. 15 (lima belas) indikator kinerja yang bersifat tahunan yaitu (1) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (2) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (3) Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (6) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup

Direktorat Jenderal PDSPKP, (7) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan keputusan Menteri Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, (8) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (9) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (10) Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 Serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (11) Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (13) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (14) Persentase Dokumen Kerja Sama yang disusun/Ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal PDSPKP, (15) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.

4. Alokasi anggaran Sekretariat Ditjen Penguatan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp89.592.966.000,- (Delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Terdapat Efisiensi sebesar Rp19.057.041.000,- (Sembilan belas miliar lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) Pagu efektif Setditjen PDSPKP menjadi sebesar Rp70.535.925.000,- (Tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp54.366.487.000,- (Lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) setara dengan 60,68% terhadap pagu awal dan sebesar 77,08% dari pagu anggaran efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Sumber Daya Manusia	5
E. Sistematika Penyajian LKj	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja	9
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	12
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	12
1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	12
2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	15
3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	16
4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	17
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	19

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	24
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	28
8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	34
9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	37
10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	39
11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	44
12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	47
13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	49
14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	51
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	53
16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan).....	56
17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	57
18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	59
19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen).....	64
20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen).....	68

C. Realisasi Anggaran	71
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Permasalahan dan Rekomendasi	72
C. Tindaklanjut atas Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025	72
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025	7
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025.....	10
Tabel 3.	Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	13
Tabel 4.	Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025	14
Tabel 5.	Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	15
Tabel 6.	Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	17
Tabel 7.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.....	18
Tabel 8.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.....	20
Tabel 9.	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	24
Tabel 10.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.....	29
Tabel 11.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	35
Tabel 12.	Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP	38
Tabel 13.	Ikhtisar pencasspaian Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	40
Tabel 14.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	45
Tabel 15.	Ikhtisar Pencapaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	47

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	49
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	52
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.....	54
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan).....	56
Tabel 20. Ikhtisar pencapaian Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	57
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP.....	60
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	65
Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Pegawai Setditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025	5
Gambar 2.	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025	5
Gambar 3.	Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025.....	9
Gambar 4.	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup Ditjen PDSPKP Semester I Tahun 2025	19
Gambar 5.	Rapat Penilaian Mandiri SAKIP	21
Gambar 6.	Rapat Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen PDSPKP	21
Gambar 7.	Finalisasi data dukung LKE SAKIP	22
Gambar 8.	Rapat Penyusunan rencana aksi percepatan pencapaian IKU	23
Gambar 9.	Rapat Penyampaian Progres Pemenuhan Dokumen SAKIP ..	23
Gambar 10.	Capaian Sementara Nilai IKPA Ditjen PDSPKP	25
Gambar 11.	Monitoring Capaian IKPA pada Pengisian Capaian Output dan Rencana Penarikan Dana	26
Gambar 12.	Rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA KKP pada Indikator Halaman III DIPA Periode September Tahun 2025	28
Gambar 13.	Rapat Pembahasan Bahan Strategic Planning Ditjen PDSPKP	30
Gambar 14.	Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026	31
Gambar 15.	Rapat konsultasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025	34
Gambar 16.	Persiapan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi	37
Gambar 17.	Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan II	39
Gambar 18.	Pembahasan hasil klarifikasi kompetensi teknis penilaian kompetensi jabatan fungsional bidang PDSPKP.....	39
Gambar 19.	Konsultasi Publik Rancangan PermenKP tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pergaraman...	42
Gambar 20.	Konsultasi Publik Rancangan PermenKP tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.....	43
Gambar 21.	Konsultasi Publik Rancangan Perpres tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	44

Gambar 22. Pelatihan Digitalisasi Dokumen pada tanggal 4 September 2025 di Ruang Rapat Investasi GMB III Lantai 15	45
Gambar 23. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP	46
Gambar 24. Penataan Arsip	46
Gambar 25. Rapat monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP)	48
Gambar 26. Audiensi calon penyedia sarana sistem rantai dingin	49
Gambar 27. Penataan Organisasi UPT BBP3KP	51
Gambar 28. Pemutakhiran Proses Bisnis Level 2 dan 3 lingkup Ditjen PDSPKP	51
Gambar 29. Aspek dan bobot penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2025	52
Gambar 30. Evaluasi Mandiri Implementasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PDSPKP bersama Inspektorat IV	53
Gambar 31. Validasi Nasional Satudata Bidang PDSPKP Tahun 2024	55
Gambar 32. Tim yang menghadiri Pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat	58
Gambar 33. Pertemuan the 20 th Session of the COFI Sub Committee on Fish Trade (SC-FT)	61
Gambar 34. Pembahasan Concern Indonesia	61
Gambar 35. Monev akhir MSP antara KKP dan SFPF	62
Gambar 36. Rapat Pembahasan Kerja sama dengan BPOM	63
Gambar 37. Audiensi dengan KKP-PTMA	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Setditjen PDSPKP Tahun 2025	73
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Ditjen PDSPKP tidak hanya berfungsi sebagai penopang administratif, tetapi juga berperan strategis dalam memastikan keterpaduan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Salah satunya mendukung kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* di mana kebutuhan dan preferensi pasar menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memenuhi standar yang dibutuhkan pasar, sehingga lebih mudah diterima dan diminati oleh konsumen. Untuk menjawab tantangan tersebut, produk kelautan dan perikanan dituntut memiliki karakteristik unggul, yakni berkualitas tinggi (*high quality*), aman untuk dikonsumsi (*safe*), dapat ditelusuri asal-usulnya (*traceable*), memiliki nilai tambah yang tinggi (*high value content*), serta kompetitif di pasar (*competitive*). Pelaksanaan kebijakan ini dirancang secara berkelanjutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang, guna memastikan konsistensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan strategis sektor kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan itu, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat

dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja triwulan III tahun 2025 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pihak pemberi mandat. Melalui laporan ini, dirumuskan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada periode selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

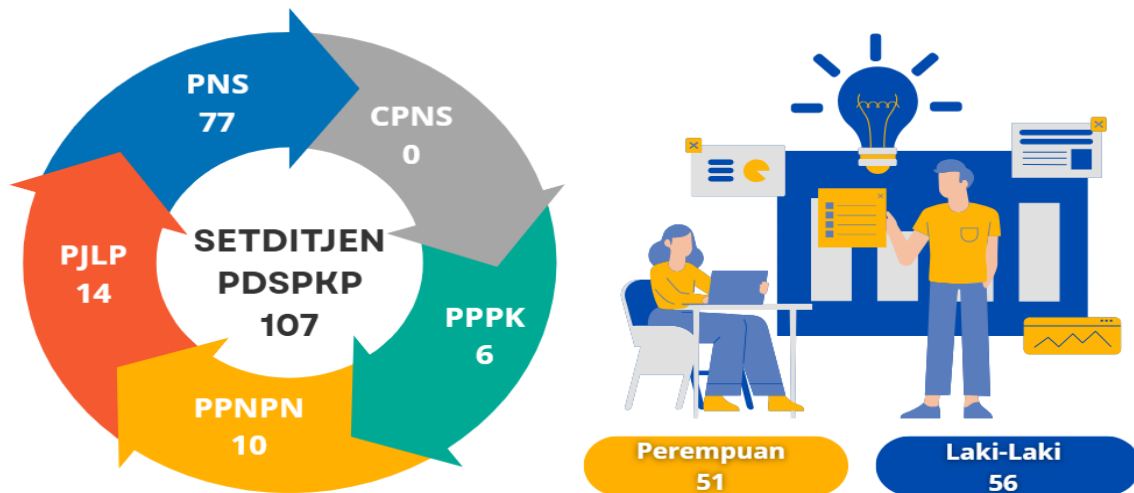
1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
7. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
9. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, serta Nota Dinas Sekretariat Ditjen PDSPKP Nomor 3635/DJPDSPKP.1/RSDM.210/IX/2025 tanggal 25 September 2025 perihal Penyampaian Surat Tugas Ketua Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP, adapun Tim Kerja lingkup Setditjen PDSPKP sebagai berikut:

1. Tim Kerja Program;
2. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur;
3. Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
4. Tim Kerja Hukum;
5. Tim Kerja Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
6. Tim Kerja Data dan Layanan Publik;
7. Tim Kerja Keuangan;
8. Tim Kerja Pengendalian Risiko dan Pengadaan Barang/Jasa;
9. Kepala Bagian Umum.

D. Sumber Daya Manusia



Gambar 1. Jumlah Pegawai Setditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025

E. Sistematika Penyajian LKj

Laporan kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJMN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJMN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Untuk tahap penguatan fondasi transformasi tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berperan dalam mendukung arah kebijakan nasional, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi KKP. Pada tahap penguatan transformasi tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) transformasi ekonomi, dan (b) ketahanan sosial budaya dan ekologi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja berisi tentang pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025

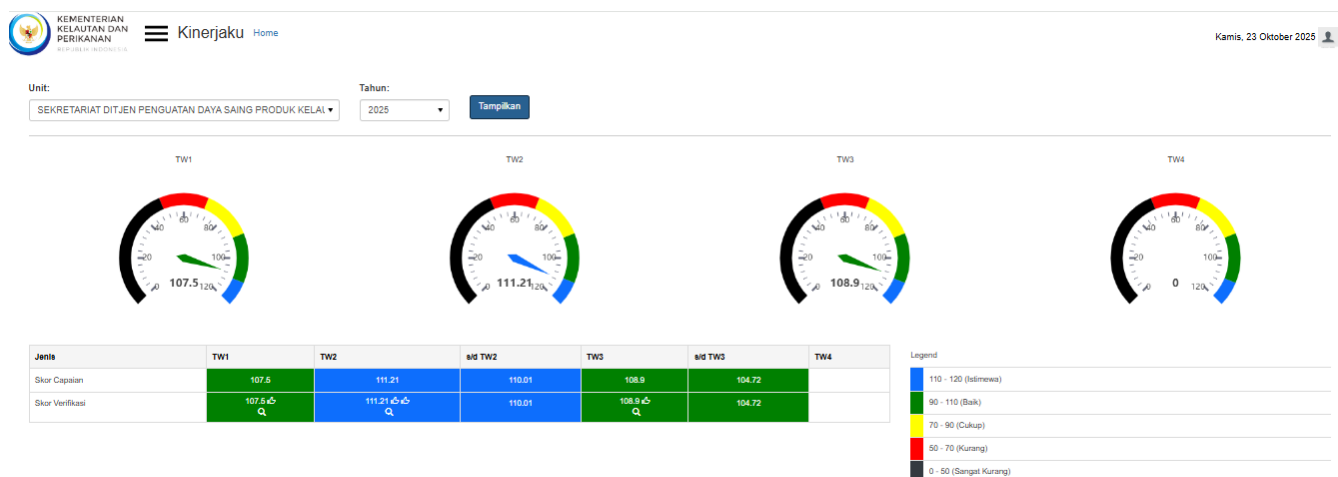
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5
		3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	81
		4.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	76
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,5
		8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,5
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	81
		10.	Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100
		11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		12.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	76
		13.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	65
		14.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	90
		16.	Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12
		17.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100
		18.	Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80
		19.	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan. 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan bersifat triwulanan, 2 (dua) bersifat semesteran, dan 15 (lima belas) bersifat tahunan. Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setditjen PDSPKP pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 108,9%(Baik). NKO tersebut merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW III 2025	% Terhadap Target TW III	% Terhadap Target 2025
		Tahun 2025	TW III 2025			
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85	85	88,18	103,74	103,74
	2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5	-	-	-	-
	3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	81	-	-	-	-
	4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	76	-	-	-	-
	5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86	-	-	-	-
	6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92	-	-	-	-
	7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,5	-	-	-	-
	8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,5	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW III 2025	% Terhadap Target TW III	% Terhadap Target 2025
			Tahun 2025	TW III 2025			
		9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	87	-	-	-	-
		10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100	-	-	-	-
		11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	80	-	-	-	-
		12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	76	-	-	-	-
		13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	65	-	-	-	-
		14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77	-	-	-	-
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	90	-	-	-	-
		16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12	9	9	100	75
		17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW III 2025	% Terhadap Target TW III	% Terhadap Target 2025
		Tahun 2025	TW III 2025			
	18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80	-	-	-	-
	19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5	≤5	1,32	120	120
	20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	80	-	-	-	-

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) yang terbit pada LHP-nya pada periode 1 Oktober 2024-30 Juni 2025 (Triwulan IV Tahun 2024

s.d. Triwulan II Tahun 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II sampai dengan 30 September Tahun 2025 (Triwulan III Tahun 2025).

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	85	85	80	85	88,18	95,9	86,25	88,18	103,74	103,74	-8,05	2,24

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 88,18%. Capaian ini setara dengan 103,74% terhadap target Triwulan III Tahun 2025, dan juga 103,74% terhadap target Tahun 2025 yang masing-masing ditetapkan sebesar 85%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya (TW II 2025) sebesar 95,9%, maka capaian Triwulan III Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 8,05%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya (TW III 2024) sebesar 86,25%, maka terdapat peningkatan capaian sebesar 2,24%.

Dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja Triwulan III Tahun 2025 Sekretariat Ditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna menindak lanjuti atas laporan hasil pemeriksaan beserta dengan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal. Hal ini bertujuan agar dokumen tersebut dapat diterima oleh tim Inspektorat Jenderal dan dinyatakan tuntas. Pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja antara lain:

- a. Melaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan inspektorat jenderal pada tanggal 22 Agustus 2025 yang

diikuti oleh Perwakilan unit Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP. Pada kegiatan ini dilakukan pembahasan terkait laporan hasil pemeriksaan beserta dengan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi. Hal ini bertujuan agar dokumen tersebut dapat diterima oleh tim Inspektorat Jenderal dan dinyatakan tuntas. Atas tindak lanjut tersebut kemudian di upload ke aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>

- b. Melaksanakan kegiatan pembahasan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan inspektorat jenderal pada tanggal 11 September 2025 yang diikuti oleh Auditor Inspektorat IV KKP, Perwakilan unit eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, serta perwakilan Tim Kerja lingkup Setditjen PDSPKP. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan pembahasan terkait laporan hasil pemeriksaan beserta dokumen tindak lanjut hasil rekomendasi menjadi indikator utama dalam penilaian capaian indikator hasil pengawasan periode triwulan III. selanjutnya dokumen tindak lanjut tersebut di upload melalui aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>.

Tabel 4. Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekom	% Sisa Rekom
1	Direktorat Logistik	0	0	100%	0	0%
2	Direktorat Pengolahan	0	19	100%	0	0%
3	Direktorat Pemberdayaan Usaha	0	5	100%	0	0%
4	Direktorat Pemasaran	23	23	100%	0	0%
5	Setditjen PDSPKP	80	67	83,75%	13	16,25%
6	BBP3KP	7	7	100%	0	0%
TOTAL		110	97	88,18%	13	11,82%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan III Tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 88,18% (tuntas 97 dari 110 rekomendasi).

2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2025.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	≤0,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan <0,5. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Sifat polarisasi indikator kinerja ini adalah *minimize* atau semakin kecil maka kinerjanya semakin baik. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;

- b. Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode Juli sd September Tahun 2025 Lingkup Ditjen PDSPKP diselenggarakan pada tanggal 13 - 15 Oktober 2025. *Output* kegiatan ini yaitu rekonsiliasi transaksi *to do list* dan pendetilan transaksi serta tutup periode pada aplikasi sakti dan monsakti;
- c. Melakukan pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp522.581.306,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp523.081.000,- atau setara dengan 100%.

3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
- d. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif presiden;
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	81	-	-			-	-	-	-

Indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP ditargetkan 81%. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan II belum dapat diketahui tingkat capaiannya dan Pada tahun 2024 dengan target 80%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP melaksanakan pemantauan atas pemanfaatan bantuan pemerintah yang termasuk dalam kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP.



4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 76. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi setiap hari senin yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP;
- Penanganan Pengaduan lingkup Ditjen PDSPKP Bulan Juli, Agustus, dan September 2025 dan konsultasi/pengaduan yang diterima selain melalui SP4N LAPOR! telah seluruhnya diinput pada aplikasi SP4N LAPOR! dengan status tuntas. Laporan penanganan pengaduan juga telah disampaikan kepada Inspektorat V selaku Tim Penanganan Pengaduan Kementerian secara berjenjang;
- Pembentukan Tim Penilai Mandiri Pembangunan Zona Integritas Ditjen PDSPKP Tahun 2025;
- Pemantauan Sistem Pembangunan Anti Korupsi Gratifikasi, Pengelolaan Pengaduan, dan MR KKN) lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 7 Agustus 2025;

- e. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup Ditjen PDSPKP Semester I Tahun 2025 pada tanggal 12 Agustus 2025;
- f. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Peberdayaan Usaha pada tanggal 19 – 20 Agustus 2025;
- g. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas BBP3KP pada tanggal 25 – 26 Agustus 2025;
- h. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pemasaran pada tanggal 27 – 28 Agustus 2025;
- i. Pemantauan Implementasi Pengelolaan Konflik Kepentingan lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 3 September 2025
- j. Sosialisasi Penanganan Konflik Kepentingan di lingkungan KKP pada tanggal 24 September 2025;
- k. Pelaksanaan evaluasi capaian triwulan II Reformasi Birokrasi Tematik lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 22 – 29 September 2025.



Gambar 4. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup Ditjen PDSPKP Semester I Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 30.147.560,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp 30.200.000,- atau setara dengan 100%.

5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Itjen KKP terhadap penerapan SAKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Ditjen PDSPKP.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		86	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 86. Indikator Nilai Penilaian Mandiri AKIP bersifat tahunan sehingga capsaianya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

1. Rapat Penilaian Mandiri SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) dilaksanakan tanggal 3-4 Juli 2025

Penilaian Evaluasi Mandiri dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja yaitu pada laman www.kinerjaku.kkp.go.id

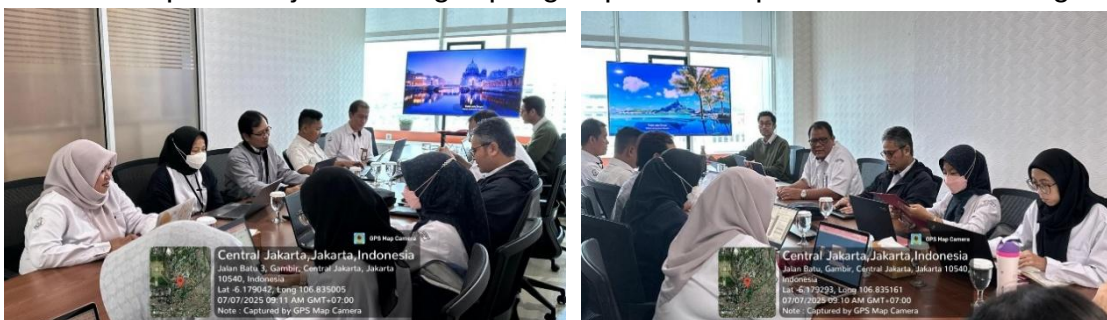


Gambar 5. Rapat Penilaian Mandiri SAKIP

2. Rapat Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen PDSPKP TA 2025 dilaksanakan tanggal 7 Juli 2025.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti pada rapat evaluasi SAKIP lingkup Ditjen PDSPKP TA 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Menyelaraskan data dukung yang diperlukan pada pemenuhan data Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Inovasi pada evaluasi SAKIP;
- b) Perlunya komunikasi antara tim penguatan akuntabilitas dengan tim inspektorat jenderal agar pengumpulan dan penilaian data dukung



Gambar 6. Rapat Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen PDSPKP

3. Rapat Evaluasi atas rencana aksi Periode Triwulan II Tahun 2025 sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi

dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan tanggal 8 Juli 2025.

4. Rapat Penilaian Kinerja Triwulan II Anggaran 2025 pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) KKP, dilaksanakan tanggal 10 Juli 2025

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Penilaian Kinerja Triwulan II Anggaran 2025 pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) KKP. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Ditjen PDSPKP, GMB III Lantai 14, KKP tanggal 10 Juli 2025. Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Kerja Program Sekretariat Ditjen PDSPKP, dihadiri oleh perwakilan Biro Perencanaan KKP, perwakilan Inspektorat Jenderal KKP dan Perwakilan Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan penilaian kinerja Triwulan II TA 2025 pada lingkup Ditjen PDSPKP.

5. Pembahasan finalisasi data dukung LKE SAKIP Tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP dilaksanakan tanggal 14 Juli 2025.

Dalam rangka penilaian SAKIP 2025 lingkup Ditjen PDSPKP, maka telah dilakukan finalisasi penilaian dan kompilasi data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 dengan pimpinan Rapat adalah Ketua Tim Kerja Program dan dipandu oleh Penanggung Jawab Monitoring dan evaluasi Timja Program Setditjen PDSPKP dan di hadiri oleh Inspektorat IV sebagai mitra Ditjen PDSPKP.



Gambar 7. finalisasi data dukung LKE SAKIP

6. Verifikasi Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen

PDSPKP) Periode Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 22 Juli 2025.

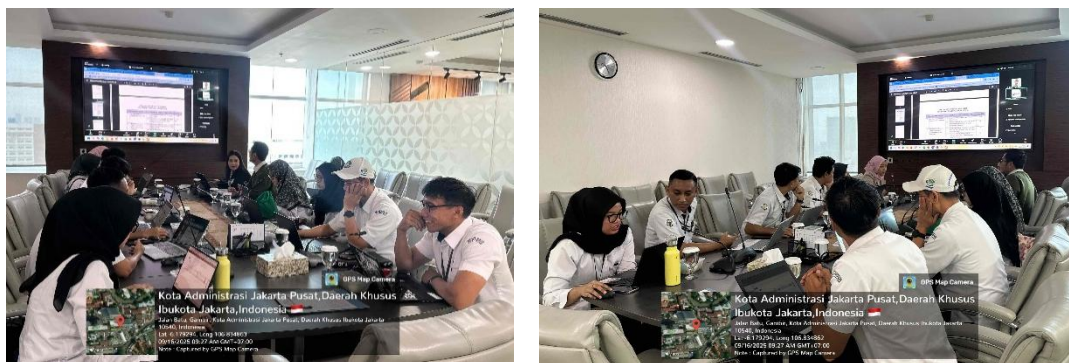
Pada periode Triwulan II, terjadi peningkatan capaian kinerja di seluruh unit kerja. Setelah dilakukan verifikasi, seluruh unit mencatatkan capaian di atas 100%, yang menandakan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program dan pelaporan kinerja. Capaian kinerja di tingkat Direktorat Jenderal PDSPKP juga mengalami peningkatan menjadi 93,82%, naik signifikan dibanding capaian pada triwulan sebelumnya.

7. Rapat Penyusunan rencana aksi percepatan pencapaian IKU yang tidak mencapai target pada triwulan I tahun 2025 (IKU Ekspor) dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2025.



Gambar 8. Rapat Penyusunan rencana aksi percepatan pencapaian IKU

8. Rapat Penyampaian Progres Pemenuhan Dokumen SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025 dan Hasil Uji Coba Pengembangan Fitur Aplikasi Kinerjaku dilaksanakan tanggal 16 September 2025.



Gambar 9. Rapat Penyampaian Progres Pemenuhan Dokumen SAKIP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 370.375.304,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp 1.119.347.000,- atau setara dengan 59%.

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)				92								

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 92. Indikator ini bersifat tahunan sehingga penghitungannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025.

Dalam rangka optimalisasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Jenderal PDSPKP pada periode Triwulan III tahun 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan kegiatan dan

berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Melaksanakan monitoring capaian IKPA terhadap progres pengisian Capaian Output periode Agustus 2025 dengan seluruh Unit Kerja dan Satker Tugas Pembantuan lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 1 sampai dengan 10 setiap bulannya, kegiatan monitoring dilakukan secara daring dan diikuti oleh 34 Satker Tugas Pembantuan (TP). Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Aplikasi OMSPAN per tanggal 30 September 2025 data capaian IKPA Ditjen PDSPKP periode September 2025 sebesar 97,44. Data tersebut sebagai data capaian tahun 2025.

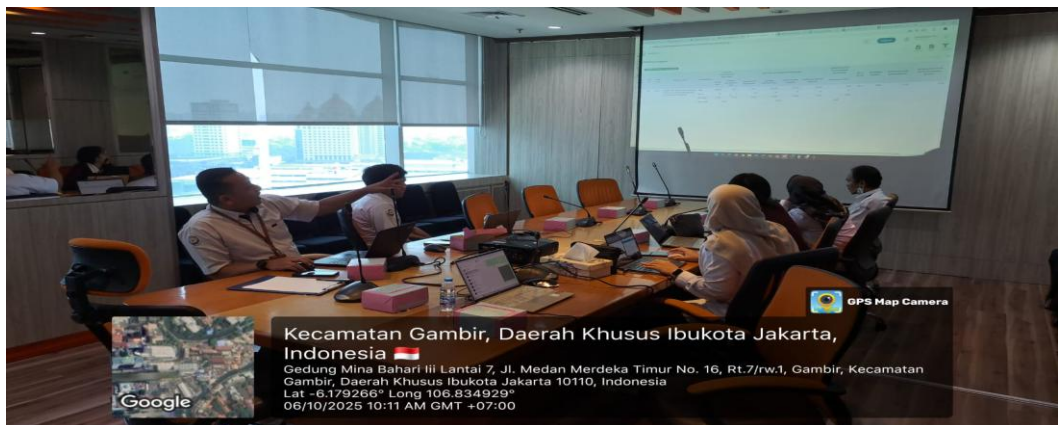
NO	KODE EST	NAMA EST	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	88.24	96.39	100.00	100.00	99.29	100.00	97.44	100%	0.00	97.44
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.24	19.28	10.00	10.00	9.93	25.00				
			Nilai Aspek		94.12			98.92		100.00				

Gambar 10. Capaian Sementara Nilai IKPA Ditjen PDSPKP

- Data capaian output periode September 2025 per tanggal 30 September 2025 sebesar 100% dari target capaian sebesar 100%. Hasil monitoring capaian output terdapat dari 36 Satker di lingkungan PDSPKP (1 satker pusat, 1 satker UPT dan 34 satker Provinsi).
- Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak terdapat kendala dalam penghitungan dan pengisian capaian output oleh Satker Tugas Pembantuan walaupun terdapat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dan pada akhirnya mempengaruhi pada pelaksanaan kegiatan dan penilaian indikator kinerja. Sehingga pada pelaksanaan kegiatan disampaikan kembali terkait kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian keuangan terkait pelaksanaan anggaran

dan penetapan pengisian capaian indikator kinerja pelaksana anggaran tahun 2025.

- Output pelaksanaan kegiatan yaitu, seluruh satker di lingkungan Ditjen PDSKP melakukan pengisian capaian output dengan nilai maksimal 100%.
- Selain pengisian capaian Output, dilaksanakan pengisian proyeksi Rencana Penarikan Dana pada tanggal 6 Oktober 2025. Kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi indikator Rencana Penarikan Dana Triwulan III dan pengisian proyeksi Rencana Penarikan Dana periode Triwulan IV.



Gambar 11. Monitoring Capaian IKPA pada Pengisian Capaian Output dan Rencana Penarikan Dana

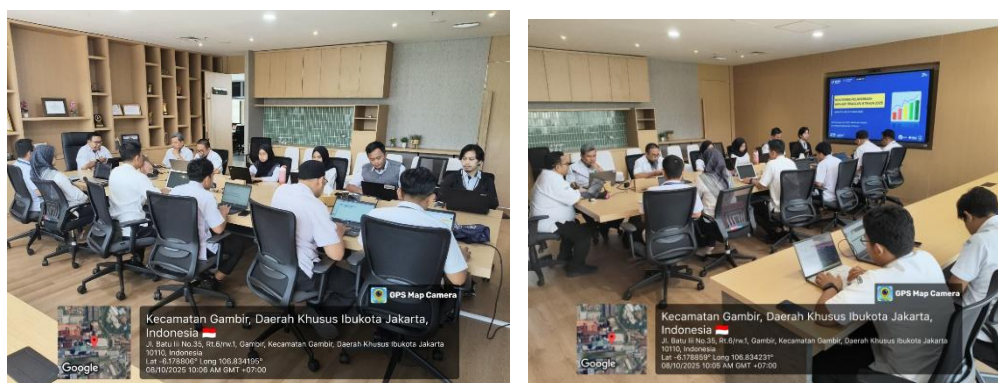
- b. Keikutsertaan dalam rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA Periode September Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan, KKP pada tanggal 6 Oktober 2025. Adapun laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagai berikut:

- Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 1444/SJ.2/210/VI/2025 tanggal 2 juni 2025, penetapan target capaian IKPA Tahun 2025 pada semester I sebesar 84,00 dan semester II sebesar 92,00. Target tersebut ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Penetapan target pada Rencana Kerja KKP tahun 2025 sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.
- Capaian nilai IKPA KKP pada semester I tahun 2025 sebesar 97,97% dengan target capaian IKPA pada semester I sebesar 85,00%. Adapun indikator penghitungan capaian IKPA sebagai berikut:
 1. Capaian Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 100%, dengan indikator capaian atas revisi anggaran sebesar 100% dan capaian indikator Deivi Halaman III DIPA sebesar 85.04%.
 2. Capaian Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,86%, dengan indikator capaian atas penyerapan anggaran sebesar 87.71%, belanja kontraktual 100%, penyelesaian tagihan sebesar 100%, pengelolaan UP dan TUP sebesar 98.62%, capaian output sebesar 100%.
 3. Dispensasi SPM (Pengurang) sebesar 0,00%.
- Berdasarkan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran S-44/PB.2/2025 Tanggal 5 Februari 2025 tentang Ketentuan Batas Waktu Pemutakhiran RPD Hal III DIPA serta Pelaporan Target dan Capaian Output Tahun 2025, disampaikan bahwa batas waktu pemutakhiran RPD periode

triwulanan setiap 10 hari kerja pertama pada awal triwulan. Batas waktu petukahiran RPD halaman III DIPA untuk triwulan I diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2025, triwulan II sampai dengan 22 April 2025, triwulan III sampai dengan 14 Juli 2025 dan triwulan IV sampai dengan 14 Oktober 2025.

- Untuk memperoleh nilai maksimal 100% pada halaman III DIPA dengan nilai ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5% (lima persen). Ditjen PDSPKP akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan realisasi anggaran secara berkala pada bulan berjalan dengan melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan penggunaan anggaran belanja.



Gambar 12. Rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA KKP pada Indikator Halaman III DIPA Periode September Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 522.581.306,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp 523.081.000,- atau setara dengan 100%.

7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan

anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		81,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 81,5. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada periode Triwulan III guna pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP antara lain:

1. Rapat Pembahasan Bahan Strategic Planning Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025.

Rapat Pembahasan Bahan Strategic Planning Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PDSPKP dan dihadiri oleh para Direktur Lingkup Ditjen PDSPKP beserta Koordinator Program Unit Kerja Eselon II Ditjen PDSPKP dan Tim Kerja Program. Arahkan MKP kepada Ditjen PDSPKP adalah untuk membuat arah kebijakan sendiri terkait peran PDSPKP, tidak mengaitkan pada Blue Economy Penangkapan Ikan Terukur dan Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan, sehingga untuk arah kebijakan agar dimodifikasi sesuai dengan swasembada pangan dan peran PDSPKP. MKP menargetkan

slide value chain karena MKP ingin mengetahui peran masing-masing unit eselon I. *Objectives* diisi oleh sasaran PDS yang ingin dicapai untuk akhir tahun 2029, sehingga *objectives* PDS menjadi Meningkatkan nilai ekonomi produk kelautan dan perikanan dan Meningkatkan konsumsi ikan.



Gambar 13. Rapat Pembahasan Bahan Strategic Planning Ditjen PDSPKP

2. Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025.

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-356/MK.02/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2026. Sehubungan dengan alokasi anggaran SBPI Tahun 2026 Ditjen Ditjen PDSPKP mengusulkan ABT dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pemasaran, Akses dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
- b) Kegiatan Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
- c) Kegiatan Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan
- d) Kegiatan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
- e) Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan

Usulan ABT Ditjen PDSPKP untuk mendukung Program Prioritas Presiden antara lain :

- a) Modelling Rantai Pasok Logistik Hasil Perikanan di Kopdeskel Merah Putih
- b) Revitalisasi Kapasitas Laboratorium Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan



Gambar 14. Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026

3. Rapat Pembahasan Bahan Perbaikan *Strategic Planning* 2025-2029 Ditjen PDSPKP dan Pembahasan RO SBKK Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025
4. Rapat Pembahasan Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4-5 Agustus 2025

Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Agustus 2025 yang dipimpin oleh Tim Auditor, Inspektorat IV, Itjen KKP serta dihadiri oleh Koordinator Program unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan perwakilan tim kerja lingkup Setditjen PDSPKP yang telah menyusun rencana kerja anggaran tahun 2026.

Sesuai dengan PMK 62/PMK.02/2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun 2024 ruang lingkup penelaahan RKA-K/L untuk Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran mencakup 2 (dua) yaitu Kriteria Administratif dan Kriteria Substantif.

- a. Kriteria Administratif bertujuan untuk meneliti kelengkapan dokumen yang digunakan dalam penelaahan RKA-K/L. Penelaahan kriteria administratif terdiri atas penelaahan.
- b. Selain dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai kriteria administratif, terdapat dokumen lainnya yang perlu dipersiapkan sehubungan dengan penelaahan RKA-K/L yaitu antara lain:
 - 1) Surat tugas penelaahan,
 - 2) Rekap Penandaan Anggaran,

- 3) Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan format sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023,
5. Rapat Pembahasan Tindaklanjut Hasil Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025.
- Rapat dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025 yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Program serta dihadiri oleh Koordinator Program unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan perwakilan tim kerja lingkup Setditjen PDSPKP. Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan pada 29 Juli 2025 dan mulai berlaku sejak 5 Agustus 2025.
6. Rapat Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Ditjen PDSPKP Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025.

Menindaklanjuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas Penyesuaian RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2025. Setditjen PDSPKP melaksanakan rapat pembahasan rancangan kerja ditjen PDSPKP Tahun 2026 pada Rabu, 24 September 2025 pukul 13.30 di Ruang Rapat Sekretariat Ditjen PDSPKP, Lantai 14, GMB III KKP. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan unit kerja Eselon 2 Lingkup Ditjen PDSPKP dan perwakilan Tim Kerja Lingkup Setditjen PDSPKP.

Sesuai dengan PMK 62/PMK.02/2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun 2024 ruang lingkup penelaahan RKA-K/L untuk Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran mencakup 2 (dua) yaitu Kriteria Administratif (Surat Pengantar RKA-K/L, RKA-K/L, Daftar rincian pagu anggaran atau alokasi anggaran per satker/ eselon I, RKA Satker, Rencana Bisnis Anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum dan Persetujuan Komisi terkait di DPR RI) dan Kriteria Substantif (bertujuan untuk meneliti relevansi, konsistensi, dan/ atau komparasi dari setiap bagian RKA-K/L dengan

kebijakan efektivitas dan efisiensi belanja K/L dalam rangka menjalankan prinsip *value for money*)

7. Rapat Pembahasan Rencana Hibah Pembangunan Gudang Beku mendukung Ekspor Produk Perikanan ke USA, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2025

Rapat pembahasan rencana hibah pembangunan gudang beku mendukung ekspor produk perikanan ke USA dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Program dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pasar Luar Negeri, Direktorat Pemasaran, Ketua Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penyimpanan dan Distribusi, Direktorat Prasarana dan Sarana, Ketua Tim Kerja Pemetaan Usaha dan Investasi, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ketua Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil, Direktorat Pengolahan.

Rapat dilaksanakan untuk membahas penyiapan bahan paparan rencana usulan Hibah/Grant dari *Millenium Chalange Cooperation* (MCC) USA yaitu pembangunan *Cold Storage* termasuk sarana rantai dingin/pabrik es. *Cold Storage* yang dibangun dari dana hibah diproyeksikan memasok ikan ke pasar USA untuk mendorong atau berkontribusi pada ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke USA.

8. Rapat konsultasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025

Rapat Konsultasi Usulan Revisi Anggaran Ditjen PDSPKP TA 2025 dengan Bappenas dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Program dan dihadiri oleh Koordinator Program Direktorat Logistik, Direktorat Pengolahan, Direktorat Pemasaran dan BBP3KP secara *offline* serta Bappenas secara online. Dalam rangka pemenuhan anggaran pada Bantuan Pemerintah aspirasi Komisi IV DPR RI dan Kunker Wakil Presiden RI pasca efisiensi, Ditjen PDSPKP melakukan revisi pergeseran anggaran, rekomposisi dan buka blokir 2. Bappenas meminta untuk data dukung dapat dilengkapi dengan lokasi yang ditentukan untuk mengakomodasi DPR dan tidak berdampak pada target output maupun sasaran kegiatannya dan tetap menjaga kualitas Rincian Output Prioritas

Nasional yang targetnya menurun. Secara garis besar Bappenas dapat menyepakati Revisi yang dilakukan oleh Ditjen PDSPKP, namun perlu dibantu bukti dukung yang dibutuhkan untuk proses revisi tersebut.



Gambar 15. Rapat konsultasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025

9. Rapat Pembahasan Kebutuhan Anggaran Tahun 2025 dan Pembahasan Kebutuhan Anggaran terkait Belanja Pegawai (001) dan Belanja Operasional (002) Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 dihadiri oleh Kabag Umum/Kasubbag Tata Usaha/Koordinator Program unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan perwakilan tim kerja lingkup Setditjen PDSPKP. Agenda rapat yaitu Pembahasan Kebutuhan Anggaran Tahun 2025, Pembahasan kebutuhan anggaran terkait Belanja Pegawai (001) dan Belanja Operasional (002) Tahun 2026

8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 3,5. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,5 Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya belum bisa diketahui pada Triwulan III tahun 2025. Setditjen PDSPKP telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan pembahasan laporan SPIP bulan Agustus 2025 dan penginputan data pelaksanaan SPIP melalui aplikasi SILASTI pada tanggal 9 September 2025. Kegiatan diikuti oleh perwakilan unit eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan tim kerja lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP. Pelaksanaan kegiatan bertujuan menyusun laporan SPIP bulan Agustus 2025 unit eselon I Ditjen PDSPKP dan tingkat unit kerja eselon II lingkup PDSPKP. Penyusunan laporan SPIP harus memuat kegiatan/aktivitas pengendalian yang telah dilakukan selama bulan agustus 2025, yaitu: pengendalian rutin terhadap kegiatan organisasi, perencanaan, keuangan negara, kepegawaian dan kinerja.
- b. Melaksanakan kegiatan persiapan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi pada tanggal 4 Agustus 2025. Pelaksanaan kegiatan berupa pembahasan pengisian kertas kerja maturitas SPIP beserta dokumen pendukungnya. Dalam penilaian struktur dan proses terdapat sub unsur, yaitu: Penegakan integrasi dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan SDM, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, identifikasi risiko, analisis risiko, review atas kinerja, pembinaan SDM, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otoritas atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting, informasi yang relevan, komunikasi yang efektif, pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.



Gambar 16. persiapan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi

9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi dengan bobot 25% yang dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang di update pada aplikasi SIASN BKN dan E-Pegawai KKP;
- Kompetensi dengan bobot 40% yang diolah datanya dari aplikasi MyASN BKN dan E-Pegawai KKP berdasarkan Penghitungan nilai diklat struktural dan fungsional;
- Kinerja dengan bobot 30% berdasarkan hasil penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Kinerja Pegawai BKN pada aplikasi E-Pegawai KKP, dan
- Disiplin dengan bobot 5% diolah datanya dari aplikasi E-Pegawai KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan di update pada aplikasi SIMPEG.

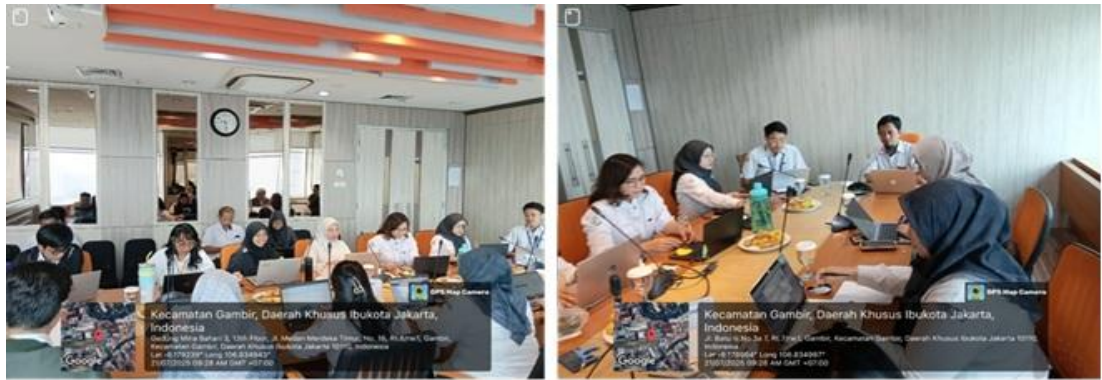
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)				81								

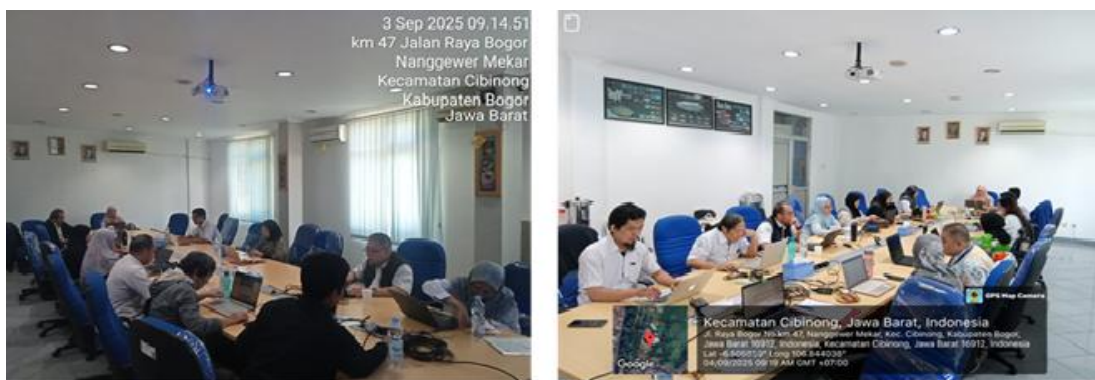
Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 87. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan pada setiap semester dan penilaian akan dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan III belum dapat diketahui tingkat capaiannya.

Setditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Setditjen PDSPKP antara lain:

- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pengawas dan Administrator , 17 Juli 2025;
- Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan II Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025;
- Pendampingan pendataan, evaluasi dan pengusulan Calon PPPK Paruh Waktu tanggal 14-15 Agustus 2025;
- Validasi dan Penginputan Nomor Induk (NI) Data Calon PPPK lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tanggal 25-28 Agustus 2025;
- Pembahasan hasil klarifikasi kompetensi teknis penilaian kompetensi jabatan fungsional bidang PDSPKP tanggal 3-4 September 2025



Gambar 17. Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan II



Pembahasan hasil klarifikasi kompetensi teknis penilaian kompetensi jabatan fungsional bidang PDSPKP

Gambar 18. Pembahasan hasil klarifikasi kompetensi teknis penilaian kompetensi jabatan fungsional bidang PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.53.137.350,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp 77.720.000,- atau setara dengan 55%.

10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, peraturan menteri yang akan disusun Ditjen PDSPKP tahun 2025 meliputi:

- a. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Rancangan Peraturan Menteri tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tabel 13. Ikhtisar pencasspaian Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025 ditargetkan 100. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian diperoleh dengan membandingkan jumlah peraturan menteri dan keputusan menteri yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2025, dibandingkan dengan jumlah peraturan menteri dan keputusan menteri yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 2103/SJ.4/TU.210/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025, Ditjen PDSPKP belum terdapat realisasi. Hal ini karena target penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan di bulan Agustus, dan Rancangan Peraturan Menteri tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan di bulan Juli. Sehingga belum terdapat realisasi penyelesaian.

Sehubungan dengan penyelesaian kedua rancangan peraturan menteri dimaksud, dapat disampaikan progres yang telah dilakukan oleh Ditjen PDSPKP pada triwulan III tahun 2025, di antaranya:

- a. Telah dilaksanakan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pergaraman pada tanggal 2 September 2025, dengan beberapa catatan sebagai berikut:
 - 1) Direktur Merek dan Geografis DJKI menyampaikan respon positif terhadap langkah yang diambil Kementerian kelautan dan Perikanan untuk pengembangan indikasi geografis sektor kelautan dan perikanan. Target Menteri Hukum untuk pendaftaran indikasi geografis menjadi nomor 1 se-ASEAN.
 - 2) Sebagai langkah pertama yang diambil Kementerian Hukum dalam pengembangan indikasi geografis adalah memetakan potensi indikasi geografis dan kelompok yang menaungi kelautan dan perikanan. Selain itu kementerian Hukum juga akan mendorong pembentukan indikasi geografis berdasarkan pemetaan potensi indikasi geografis sektor kelautan dan perikanan melalui Kanwil Hukum di daerah daerah.

- 3) Perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi nasional menyambut baik dan mendukung adanya Rancangan Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan, serta siap melakukan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan riset indikasi geografis sektor kelautan dan perikanan di pusat maupun daerah. Dinas kelautan dan perikanan di daerah diharapkan dapat berkolaborasi dengan BRIPDA di daerah untuk kegiatan riset dalam pemenuhan dokumen. Tugas beratnya adalah strategi pemanfaatan Indikasi geografis sektor kelautan dan perikanan setelah didaftarkan.
- 4) Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan dari Provinsi Bali menyampaikan dengan Peraturan presiden dan rancangan peraturan menteri kelautan dan perikanan diharapkan pengurusan indikasi geografis bisa mempercepat penetapannya termasuk koordinasi dan biaya laboratorium. Permasalahan utama dari penetapan indikasi geografis adalah pemasaran.



Gambar 19. Konsultasi Publik Rancangan PermenKP tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pergaraman

- b. Telah dilakukan beberapa kali rapat penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan, dan direncanakan akan dilakukan konsultasi publik pada bulan Oktober.

Selain itu, Sehubungan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum kepada Pelaku Usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) dalam pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sehubungan hal tersebut KKP melalui pemrakarsa Ditjen PDSPKP menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan rancangan tersebut dan pada triwulan III ini juga dilakukan konsultasi publik menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 September 2025.



Gambar 20. Konsultasi Publik Rancangan PermenKP tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, KKP melalui Ditjen PDSPKP juga melakukan penyusunan peraturan presiden yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Pada Triwulan III telah dilakukan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yaitu pada tanggal 18 September

2025. Selanjutnya Sekretaris Jenderal KKP telah mengirimkan Surat Nomor B.727/MEN-SJ/HK.150/IX/2025 tanggal 29 September 2025 kepada Menteri Hukum hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.



Gambar 21. Konsultasi Publik Rancangan Perpres tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp351.959.249,- sampai dengan bulan September 2025 dari pagu Rp 441.209.000,- setara dengan 80 %.

11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintah daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistematis dan komprehensif sehingga diperlukan pengawasan kearsipan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yaitu dilakukannya verifikasi terhadap dokumen data dukung pengawasan oleh Tim Penilai Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2025. Tahun 2025 target nilai pengawasan kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP sebesar 80.

Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 80. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Adapun upaya yang telah dilakukan Setditjen PDSPKP untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan kearsipan pada Triwulan III antara lain:

- Pelatihan Digitalisasi Dokumen pada tanggal 4 September 2025 di Ruang Rapat Investasi GMB III Lantai 15.



Gambar 22. Pelatihan Digitalisasi Dokumen pada tanggal 4 September 2025 di Ruang Rapat Investasi GMB III Lantai 15

- b. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025.



Gambar 23. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP

- c. Kegiatan Penataan Arsip pada tanggal 30 September 2025 sampai dengan 2 Oktober 2025 di Record Center Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat



Gambar 24. Penataan Arsip

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 233.430.563,- sampai dengan Bulan September 2025 dari pagu Rp 240.909.000,- atau setara dengan 97%.

12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 76. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan

indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

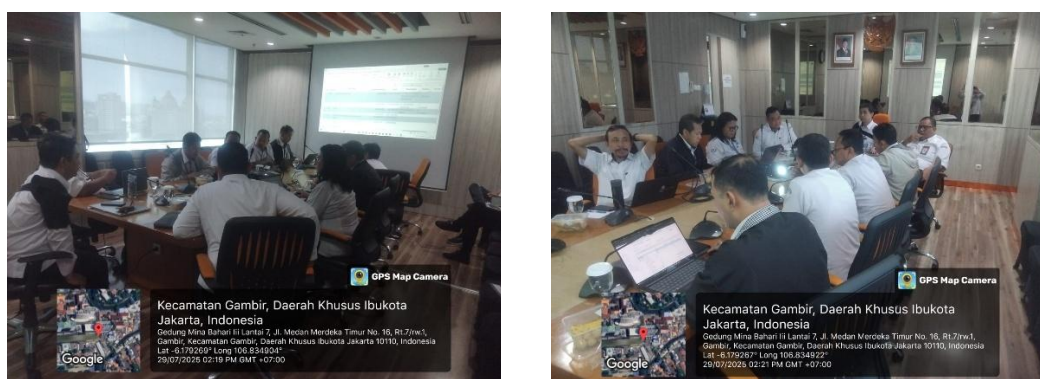
- a. Pelaksanaan rapat monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam rangka pemutakhiran Rencana Umum Pengadaan (RUP) Semester 1 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025. Kegiatan dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemutakhiran rencana pengadaan barang/jasa Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan data SIRUP (sirup.lkpp.go.id) jumlah paket pengadaan Satker Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang telah diinput dalam aplikasi SIRUP sebanyak 358 paket dengan rincian sebagai berikut: tender 1 paket, e-purchasing 10 paket, pengadaan langsung 271 paket, penunjukan langsung 2 paket, dan dikecualikan (swakelola) 74 paket. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemutakhiran SIRUP.



Gambar 25. rapat monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP)

- b. Pelaksanaan rapat audiensi calon penyedia sarana sistem rantai dingin pada kegiatan kampung nelayan merah putih tahap I tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan mengundang para calon penyedia sarana sistem rantai dingin yaitu kendaraan berpendingin, gudang beku portabel, pabrik es portabel (*slurry ice* dan balok) dan *Cool Box*. Rapat diselenggarakan sepanjang bulan Juli sampai dengan Agustus 2025. Tujuan dari

pelaksanaan rapat audiensi adalah mendapatkan informasi barang yang akan ditawarkan mulai dari kapasitas produksi, spesifikasi barang, dan pengalaman calon penyedia dalam pengadaan barang dan jasa. Calon penyedia yang hadir antara lain PT. Guardian, PT. Global Niaga Internusa, PT. DS Solutions International, PT. Astra International dan calon penyedia lainnya. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan audiensi.



Gambar 26. audiensi calon penyedia sarana sistem rantai dingin

13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0; Probis Level 1; Probis Level 2; Probis Level 3. SProbis Level 0 dan Level 1 telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3.

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-

PDSPKP (Persen)												
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 65. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Rancangan Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Rapat Penataan Organisasi UPT Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 2 - 3 Juli 2025;
- b. Rapat Penataan Tim Kerja lingkup Setditjen PDSPKP pada tanggal 17 Juli 2025;
- c. Rapat Pengelolaan Pasar Ikan Modern dan Raiser Ikan Hias pada tanggal 21 Agustus 2025;
- d. Rapat Koordinasi Implementasi Organisasi dan Tata Kerja pada Ditjen PDSPKP;
- e. Pelaksanaan Validasi Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 11 September 2025;
- f. Rapat Pemutakhiran Proses Bisnis Level 2 dan 3 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 25 September 2025;
- g. Menghadiri rapat penyusunan Peraturan Dirjen PDSPKP terkait Lembaga Pemeriksa Halal pada BBP3KP pada tanggal 15 Agustus 2025;
- h. Menghadiri Pembahasan Penambahan Ruang Lingkup Fungsi Laboratorium Kalibrasi pada BBP3KP pada tanggal 17 September 2025.



Gambar 27. Penataan Organisasi UPT BBP3KP



Gambar 28. Pemutakhiran Proses Bisnis Level 2 dan 3 lingkup Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp41.802.000,- sampai dengan Bulan September 2025 dari pagu Rp41.802.000,- atau setara dengan 100%.

14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu

pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan

<

Gambar 29. Aspek dan bobot penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2025

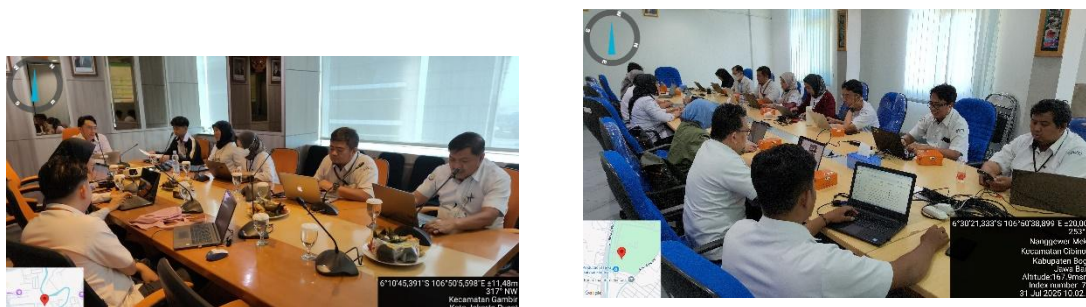
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-

Target Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 adalah 77. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Rapat Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan pada tanggal 1 Juli 2025;
- b. Rapat Koordinasi Pemenuhan Bukti Dukung PEKPPP Mandiri Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025 pada tanggal 23 Juli 2025;
- c. Evaluasi Mandiri Implementasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PDSPKP bersama Inspektorat IV pada tanggal 28 Juli-1 Agustus 2025;
- d. Rapat Koordinasi PEKPPP Mandiri Ditjen PDSPKP pada tanggal 15 September 2025;
- e. Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Ditjen PDSPKP Tahun 2025 pada tanggal 23 September 2025; dan
- f. Pembahasan Hasil Validasi Data SKM Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 25 September 2025.



Gambar 30. Evaluasi Mandiri Implementasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PDSPKP bersama Inspektorat IV

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 73.850.754,- sampai dengan Bulan September 2025 dari pagu Rp 91.229.000,- atau setara dengan 81%.

15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan

pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional. Data diambil dari pengisian kuesioner secara sampling, yang diisi oleh petugas Pengelola Data kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah teregister pada tahun sebelumnya. Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

- Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (X1), Bobot Nilai 30%.
- Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
- Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

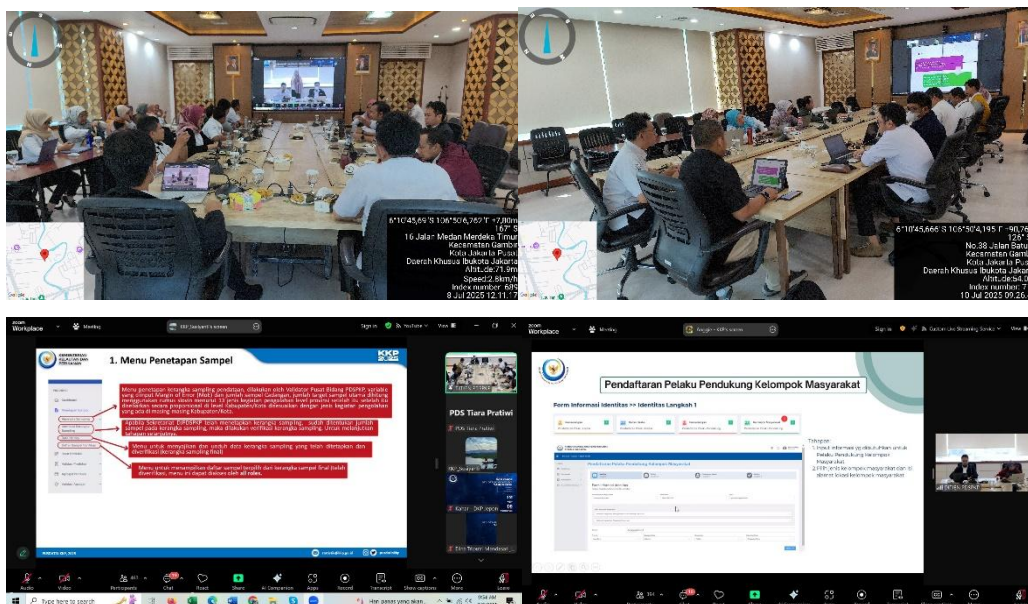
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 90. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP antara lain:

- Rapat Harmonisasi Data Lalu Lintas Ikan, Perdagangan dan Logistik Produk Olahan pada tanggal 3 Juli 2025;
- Workshop* Satu Data Bidang PDSPKP Tahun 2025 pada tanggal 8-10 Juli 2025;
- Rapat Pembahasan *Dashboard* Ditjen PDSPKP pada 21 Juli 2025;

- d. Rapat Penyusunan Rancangan Spesifikasi Produk Informasi Geospasial (SPIG) Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 24 Juli 2025, 6 Agustus 2025, dan 10 September 2025;
- e. Rapat Analisa dan Penyajian Data PDSPKP pada tanggal 7 Agustus 2025;
- f. Rapat Koordinasi Pangsa Pasar Produk Perikanan pada tanggal 19 Agustus 2025 dan 30 September 2025;
- g. Rapat Validasi dan Verifikasi Data Ekspor dan Impor Perikanan pada tanggal 21 Agustus 2025;
- h. Rapat Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Ikan tanggal 25 Agustus 2025;
- i. Reviu Implementasi Satu Data Bidang PDSPKP Tahun 2025 pada tanggal 28 Agustus 2025;
- j. Rapat Pembahasan dan Finalisasi Data Utama lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 3 September 2025; dan
- k. Reviu Hasil Penghitungan Volume Produk Olahan Tahun 2024 pada tanggal 8 September 2025.



Gambar 31. Validasi Nasional Satudata Bidang PDSPKP Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp161.346.499,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp 236.017.000,- atau setara dengan 68%.

16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)

Ruang lingkup layanan dukungan perkantoran adalah lingkup Ditjen PDSPKP, yang terdiri dari: (1) Terselenggaranya gaji dan tunjangan untuk pembayaran belanja pegawai (2) Operasional dan pemeliharaan kantor.

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	9	6	3	12	9	6	9	9	100,00	75,00	50,00	0,00

Capaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 9 layanan. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target Triwulan III Tahun 2025, dan 75% terhadap target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 12 layanan. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya (TW II 2025) sebesar 6 layanan, maka capaian Triwulan III Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 50%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya (TW III 2024) sebesar 9 layanan, maka tidak terdapat perubahan capaian atau pertumbuhan sebesar 0%. Namun demikian terdapat perbedaan satuan yang digunakan, yaitu tahun 2024 menggunakan satuan bulan, sedangkan tahun 2025 menggunakan satuan layanan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam melakukan analisis perbandingan antar tahun.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini di Triwulan III antara lain:

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Satker Pusat;
- Layanan Rumah Tangga dan Ketatausahaan;

- c. Pembayaran gaji PPNP Satker Pusat;
- d. Pembayaran Gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Satker Pusat;
- e. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker Pusat

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp47.758.062.613,- sampai dengan Bulan September 2025 dari pagu Rp. 68.299.170.000,- atau setara dengan 78%.

17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Ditjen PDSPKP adalah masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Kelautan dan Perikanan khususnya pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang kemudian dilakukan serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan dan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Advokasi hukum meliputi bantuan hukum dan pembinaan hukum.

Tabel 20. Ikhtisar pencapaian Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2025 target persentase penyelesaian permasalahan hukum Lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 100%. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025. Oleh karena itu indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan maupun dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dan dengan capaian pada periode yang sama.

Pelayanan bantuan hukum yang ditangani oleh Ditjen PDSPKP pada Triwulan III berupa pendampingan Tim Teknis Ditjen PDSPKP dalam memenuhi undangan wawancara dan permintaan dokumen oleh Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, di antaranya:

1. Pendampingan Tim Teknis Ditjen PDSPKP dalam memenuhi undangan wawancara dan permintaan dokumen oleh Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pabrik Tepung Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2016



Gambar 32. Tim yang menghadiri Pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat

2. Pendampingan Hukum terkait adanya perkara dugaan terjadinya tindakan pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, Pada tanggal 20 Agustus 2025 memberikan pendampingan hukum kepada

pegawai/pejabat atas dasar surat S.Pgl/S-5/6415/VIII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 5 Agustus 2025 hal pemanggilan sebagai saksi perkara dugaan terjadinya tindakan pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang terjadi di Pasar Ikan Higienis (Everfresh Market) Jalan Pejompongan, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

3. Pendampingan pemenuhan dokumen dan penunjukan ahli pada permintaan kejaksaan rote ndao terkait Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA. 2023 dan Permohonan Penunjukan Saksi Tim Asistensi Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao TA. 2023.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 24.185.960,-. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp 102.938.000,- setara dengan 23%.

18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)

Sesuai dengan Permen KP No. 23 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen kerja sama adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana kerja sama dengan mitra kerja sama baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP. Terdapat 2 bentuk dokumen kerjasama di KKP yaitu dokumen kerja sama nasional/antar lembaga dan internasional. Ada beberapa jenis kerja sama yaitu kerja sama antar Lembaga, kerja sama bilateral, kerja sama regional dan multilateral.

Persentase dokumen kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP adalah persentase dokumen kerjasama yang diterima/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP. Dokumen yang diterima oleh

Ditjen PDSPKP adalah dokumen usulan kerja sama yang dibedakan berdasarkan bentuk dokumen kerja samanya sedangkan Dokumen yang ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP adalah dokumen hasil kegiatan implementasi yang dibedakan berdasarkan kerangka kerja samanya.

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP

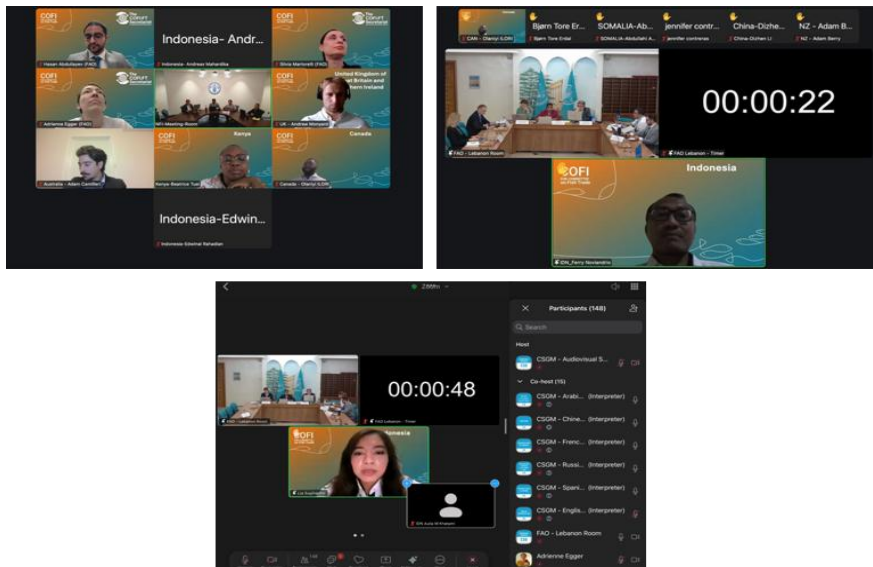
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindak lanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Tingkat Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 80%. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Selama bulan Juli – September 2025, Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain sebagai berikut:

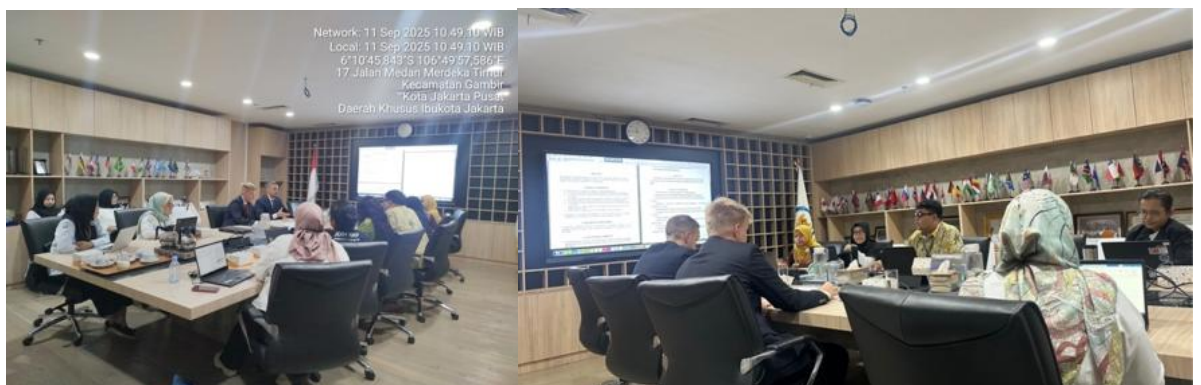
- a. Kesepakatan Kerjasama Internasional Lingkup Ditjen PDSPKP;
 - 1) Melaksanakan Rapat Pembahasan Kertas Posisi DELRI Sidang COFI – *Fish Trade* tanggal 1 September 2025;
 - 2) Menghadiri Rapat Pembahasan Kerja Sama dengan Pemerintah Kamboja tanggal 2 September 2025;
 - 3) Menghadiri Webinar IPNLF " *advocating for SSF market access at the 2025 FAO fish trade meeting*" tanggal 2 September 2025;
 - 4) Menghadiri Pembahasan *Counterdraft* MOU KKP – Rusia tanggal 3 September 2025;
 - 5) Melaksanakan Rapat Pembahasan FAO *Guideline of Ecolabelling* dengan IPNLF tanggal 4 september 2025;

- 6) Rapat Pembentukan COAST *Joint Committee* tanggal 4 September 2025;
- 7) Penjajakan rencana kerja sama BBP3KP dan LPPOM MUI tanggal 8 September 2025;
- 8) Menghadiri pertemuan the 20 th Session of the COFI Sub Committee on Fish Trade (SC-FT) tanggal 8-12 September 2025;



Gambar 33. pertemuan the 20 th Session of the COFI Sub Committee on Fish Trade (SC-FT)

- 9) Menghadiri Rapat Pembahasan *Concern* Indonesia dan Penyampaian Posisi Rusia terkait Draf MoU Perikanan dan Budidaya RI-Rusia tanggal 11 September 2025;



Gambar 34. Pembahasan Concern Indonesia

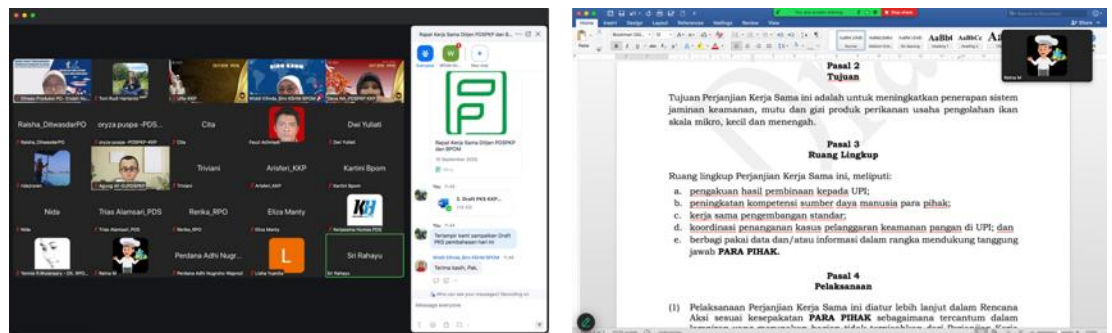
10) Mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi akhir Memorandum



Gambar 35. Monev akhir MSP antara KKP dan SFPP

- 11) Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bilateral Sektor Kelautan dan Perikanan tanggal 17 September 2025;
- 12) Menghadiri Pembahasan *Counterdraft* MoU KKP-ACIAR tanggal 18 September 2025;
- 13) Rapat Pembahasan *Concept Note Green Climate Fund* tanggal 18 September 2025;
- 14) Rapat Pembahasan *COAST Facility* tanggal 18 September 2025;
- 15) Rapat Penyusunan Posisi Indonesia pada Pembahasan Draf Mol Perikanan dan Budidaya RI-Rusia tanggal 19 September 2025;
- 16) Pembahasan *Counterdraft Plan of Action* dan TOR Indonesia – Tanzania *Joint Technical Committee* RI-Tanzania tanggal 22 September 2025;
- 17) Pembahasan Permohonan Pertemuan *Permanent Secretary Ministry of Marine and Blue Economy Federal* Nigeria dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tanggal 22 September 2025;
- 18) Pembahasan dan Penandatanganan Kerja sama Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) RARE Tahun Anggaran 2025-2026 tanggal 23 September 2025;
- 19) Penyusunan posisi DELRI untuk 5th Plenary WG TSD ACAFTA tanggal 23 September 2025;

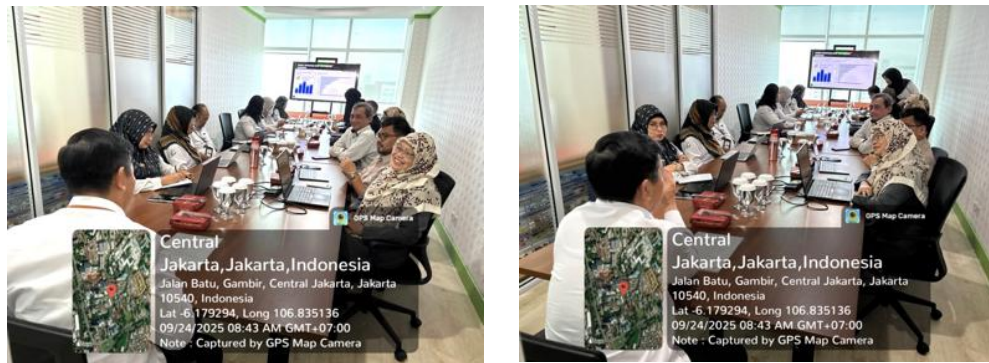
- 20) Diseminasi Penyelenggaraan COP 30 dan persiapan DELRI tanggal 24 September 2025;
 - 21) Pertemuan *Regional Development through Indonesia's Seafood Processing Supply Chain* tanggal 25 September 2025;
 - 22) Regional Consultation Workshop on the Study of the Small-Scale Fisheries Supply Chain in Southeast Asia tanggal 24-26 September 2025;
- b. Kesepakatan Kerjasama Antarlembaga Lingkup Ditjen PDSPKP;
- 1) Melaksanakan Rapat Pembahasan Amandemen PKS antara Ditjen PDSPKP KKP dengan Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum tanggal 3 September 2025;
 - 2) Menghadiri Rapat Pembahasan Pembaruan Kesepakatan Bersama antara KKP dengan UGM tanggal 4 September 2025;
 - 3) Melaksanakan rapat pembahasan PKS antara Ditjen PDSPKP dengan BPOM tanggal 10 September 2025;



Gambar 36. Rapat Pembahasan Kerja sama dengan BPOM

- 4) Menghadiri Rapat penyampaian hasil riset *quick assesment* UPI oleh DFW tanggal 10 September 2025;
- 5) Menghadiri Rapat Audiensi PT. Gastiasih Caraka tanggal 11 september 2025;
- 6) Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pemasarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan Ditjen Penguatan daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 19 September 2025;
- 7) Rapat Pemantauan Implementasi Kesepakatan Bersama antara KKP dan Yayasan MDPI tanggal 22 September 2025;

- 8) Diskusi Peluang Kolaborasi dan Dukungan WRI Indonesia untuk Implementasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2025;
- 9) Melaksanakan audiensi dengan KPKP PTMA Aisyiah tanggal 24 September 2025;



Gambar 37. Audiensi dengan KPKP-PTMA

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp209.598.089,- sampai dengan Bulan September 2025 dari pagu Rp315.532.000,- atau setara dengan 65%.

19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Kementerian / Lembaga wajib menyediakan dan melayani informasi publik secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Pemberitaan tentang Ditjen PDSPKP adalah penyampaian informasi/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan Ditjen PDSPKP. Pemberitaan negatif adalah informasi/cerita/keterangan dalam bentuk artikel yang mengandung sentimen negatif. Media massa yang dihitung adalah media cetak dan online yang telah terdaftar pada Dewan Pers Indonesia.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5	≤5	≤5	≤5	1,32	0	0	0	120	120	120	120

Capaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 1,32%. Dengan hasil ini, capaian terhadap target Triwulan III tahun 2025 mencapai 120% (terhitung otomatis pada Aplikasi Kinerjaku), yang berarti target berhasil terlampaui secara signifikan. Jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024 yang juga mencatat realisasi sebesar 0%, maka tidak terjadi pertumbuhan karena capaian telah berada pada angka maksimal, yaitu nol pemberitaan negatif.

Mengacu kepada data di atas menunjukkan bahwa selama Triwulan III terdapat 2 berita dengan tone negatif untuk bidang PDSPKP terkait dengan isu kontaminasi cesium pada udang yang di ekspor ke Amerika Serikat. Sehingga capaian rasio jumlah pemberitaan negatif bidang PDSPKP terhadap total pemberitaan sektor KP pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 1,32%. Nilai ini setara dengan 100% terhadap target Triwulan 3 tahun 2025 yaitu <5%.

Bulan	Sifat/Tendensi Pemberitaan			Total
	Positif	Negatif	Netral	
Juli	28	0	26	54
Agustus	29	1	20	50
September	31	1	15	47
Total	88	2	61	151

Dalam rangka mempertahankan capaian positif tersebut dan memperkuat citra bidang PDSPKP di ruang publik, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyebaran Narasi Positif secara Masif di Media Sosial Melalui kanal resmi media sosial Ditjen PDSPKP (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dan Youtube), dilakukan publikasi rutin untuk memperkuat citra positif sektor kelautan dan perikanan khususnya bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Konten yang diunggah menyoroti keberhasilan program dan kegiatan, kegiatan lapangan, data data capaian kinerja dan informasi seputar penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- b. Pembuatan dan Penyebaran Siaran Pers Ditjen PDSPKP secara rutin menyusun dan menyebarluaskan siaran pers resmi sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi kepada publik. Siaran pers ini berfokus pada upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta menjadi media klarifikasi terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat maupun di kalangan mitra internasional.

Isi dari siaran pers mencakup:

- Data capaian program dan kegiatan Ditjen PDSPKP, seperti perkembangan ekspor hasil perikanan, realisasi bantuan sarana prasarana, hasil pendampingan pelaku usaha, serta keberhasilan daerah dalam meningkatkan nilai tambah produk.
- Informasi aktual dan faktual, misalnya kebijakan terbaru, kegiatan promosi dagang, hasil kerja sama dengan mitra strategis, serta langkah pemerintah dalam menjaga mutu, keamanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.
- Penjelasan atau klarifikasi terhadap isu sensitif, seperti pemberitaan negatif terkait produk ekspor, agar masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan pemahaman yang benar dan proporsional.

Penyebaran siaran pers dilakukan melalui berbagai kanal, baik media massa nasional dan daerah, portal resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun media sosial Ditjen PDSPKP, sehingga informasi dapat menjangkau khalayak luas secara cepat dan konsisten.

c. Penempatan Pemberitaan (*Media Placement*)

Melakukan kerja sama dengan media massa nasional dan daerah untuk menempatkan pemberitaan positif mengenai program, capaian, dan keberhasilan Ditjen PDSPKP. Strategi ini dilakukan agar informasi dapat menjangkau masyarakat luas dan membangun persepsi publik yang konstruktif terhadap sektor kelautan dan perikanan.

d. Pembuatan dan Penayangan Materi Video

Mengembangkan berbagai materi video informatif dan inspiratif yang menampilkan potensi produk, pelaku usaha, serta inovasi di bidang kelautan dan perikanan. Konten tersebut disebarluaskan melalui media sosial, kanal YouTube Ditjen PDSPKP, serta platform Neptune TV yang tayang di Biznet IPTV, IndiHome TV, Vidio, dan YouTube.

e. Pelaksanaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Menyelenggarakan layanan informasi publik yang cepat dan responsif guna memberikan klarifikasi, tanggapan, dan pelayanan atas permohonan informasi dari masyarakat. Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, pada tahun 2024 Ditjen PDSPKP telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan berhasil meraih kategori “Informatif”, yaitu kategori tertinggi dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik.

f. Pendokumentasian Kegiatan Sebagai Bahan Publikasi dan Konten Digital

Melaksanakan dokumentasi seluruh kegiatan Ditjen PDSPKP baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjadi bahan pembuatan konten publikasi digital. Dokumentasi ini mendukung keberlanjutan produksi konten positif dan menjadi arsip komunikasi publik yang memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan informasi lembaga.

Tabel 23. Rekapitulasi Jumlah Pemberitaan Ditjen PDSPKP Berdasarkan Tone Pemberitaan

Bulan	Sifat/Tendensi Pemberitaan			Total
	Positif	Negatif	Netral	
April	69		16	85
Mei	58		2	60
Juni	39		2	41
Total	166		20	186

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 190.172.352,- sampai dengan Bulan September 2025 dari pagu Rp 194.971.000,- atau setara dengan 98%.

20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)

Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Lingkungan Setditjen PDSPKP terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Setditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut:

- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025 (12,5%).
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (25%).
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 (25%)
- Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).

Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	S.d TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Tingkat Kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 80%. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- Telah dilaksanakan kegiatan Persiapan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2027 Lingkup Ditjen PDSPKP diselenggarakan pada tanggal 3 - 4 September 2025. *Output* kegiatan ini yaitu membuat usulan RKBMN 2027 berpedoman pada ketentuan terbaru, memperhatikan hasil pemeriksaan BPK, serta disesuaikan dengan struktur organisasi setelah delayering;
- Pada tanggal 21 Juli 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan surat dinas ke KPKNL Jakarta II dengan nomor B.6463/DJPDSPKP.1/PL.750/VII/2025 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan BMN satker Sekretariat Ditjen PDSPKP unit Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pemasaran berupa 2 (dua) unit peralatan mesin (mesin pembuat es (IFM) dan cold storage (Ice storage)) dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan Rp. 4.059.427.500,00;
- Pada tanggal 29 Juli 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan surat dinas ke KPKNL Jakarta II dengan nomor B.6670/DJPDSPKP.1/PL.750/VII/2025 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan BMN satker Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan

- dan Perikanan berupa 10 (sepuluh) unit peralatan mesin dengan nilai perolehan diatas 100 juta dengan nilai keseluruhan Rp. 4.203.632.813,00;
- d. Pada tanggal 30 Juli 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Nota Dinas ke Biro Keuangan dan BMN dengan nomor 2830/DJPDSPKP.1/PL.750/VII/2025 perihal Permohonan Surat Persetujuan Penghapusan atas usulan Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa 3 (tiga) unit Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai perolehan keseluruhan Rp. 178.862.000,00;
 - e. Pada tanggal 4 Agustus 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Nota Dinas ke Inspektorat Jenderal IV dengan nomor 2905/DJPDSPKP.1/PL.750/VIII/2025 perihal Permohonan Reviu Usulan Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN berupa 3 (tiga) paket barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam proses dengan nilai perolehan keseluruhan Rp. 223.911.800,00;
 - f. Pada tanggal 14 Agustus 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Nota Dinas ke Biro Keuangan dan BMN dengan nomor 3048/DJPDSPKP.1/PL.750/VIII/2025 perihal Permohonan Penetapan Penghapusan BMN yang dikelola Dirjen PDSPKP pada Sekretariat Ditjen PDSPKP satker Pembantu Direktorat Logistik atas dasar Persetujuan BMN karena sebab-sebab lain yang telah diterbitkan oleh KPKNL Jakarta II dengan nomor S-693/MK/KNL.0702/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
 - g. Pada tanggal 20 Agustus 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Nota Dinas ke Biro Keuangan dan BMN dengan nomor 3113/DJPDSPKP.1/PL.750/VIII/2025 perihal Permohonan Surat Persetujuan Penghapusan atas usulan Penghapusan Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam Proses berupa 3 (tiga) paket barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam proses dengan nilai perolehan keseluruhan Rp. 223.911.800,00;
 - h. Pada tanggal 28 Agustus 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Persetujuan Penghapusan dengan nomor 7915/DJPDSPKP.1/PL.750/VIII/2025 perihal Persetujuan Penghapusan

- BMN karena Sebab Lain pada Direktorat Pemasaran berupa 3 (tiga) paket barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam proses dengan nilai perolehan keseluruhan Rp. 223.911.800,00;
- i. Pada tanggal 2 September 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Nota Dinas ke Biro Keuangan dan BMN dengan nomor 3285/DJPDSPKP.1/PL.750/IX/2025 perihal Permohonan Penetapan Penghapusan BMN yang dikelola Dirjen PDSPKP pada Sekretariat Ditjen PDSPKP satker Pembantu Direktorat Pemasaran atas dasar Persetujuan Penghapusan BMN karena sebab lain yang telah diterbitkan oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP dengan nomor B.7915/DJPDSPKP.1/PL.750/IX/2025 tanggal 28 Agustus 2025;
 - j. Pada tanggal 13 Oktober 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyampaikan Nota Dinas ke Direktorat Pemasaran dengan nomor 3901/DJPDSPKP.1/PL.750/X/2025 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghapusan BMN;

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp117.872.138,- sampai dengan Bulan September 2025 dari pagu Rp 135.590.000,- atau setara dengan 87%.

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, Alokasi anggaran Sekretariat Ditjen Penguatan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp 89.592.966.000,- (Delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Terdapat Efisiensi sebesar Rp 19.057.041.000,- (Sembilan belas miliar lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) Pagu efektif Setditjen PDSPKP menjadi sebesar Rp 70.535.925.000,- (Tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 54.366.487.000,- (Lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) setara dengan 60,68% terhadap pagu awal dan sebesar 77,08% dari pagu anggaran efektif.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP Triwulan III Tahun 2025 telah menyajikan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang baik dengan ditunjukkan nilai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,9% yang termasuk dalam kategori “Baik”.

Namun demikian upaya perbaikan peningkatan kinerja tetap akan dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran Sekretariat Ditjen PDSPKP antara lain melalui perencanaan dan penganggaran yang baik, ketatalaksanaan yang efisien, pengembangan dan pembinaan SDM yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan budaya kerja yang baik dan pelaporan yang tertib, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kebijakan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rancangan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Ditjen PDSPKP.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Setditjen PDSPKP Triwulan III tahun 2025, seluruh indikator kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP yang penghitungannya dilakukan secara triwulanan dan semesteran telah mencapai target.

C. Tindaklanjut atas Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Setditjen PDSPKP Triwulan II tahun 2025, seluruh indikator kinerja kegiatan yang penghitungannya dilakukan secara triwulanan dan semesteran telah mencapai target.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Setditjen PDSPKP Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Machmud**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Tornanda Syaifullah**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Juli 2025

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  Tornanda Syaifullah	Pihak Kesatu, Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  Machmud
--	---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤ 0,5
		3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	81
		4.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	76
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,5
		8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,5
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	81
		10.	Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100
		11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	80
		12.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	76

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	65
		14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	90
		16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12
		17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100
		18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80
		19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5
		20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	80

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
<i>PROGRAM : Dukungan Manajemen</i>	
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	89.592.966.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	89.592.966.000

Jakarta, 02 Juli 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan


Tornanda Syaifullah

Pihak Kesatu,
Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan


Machmud